

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persoalan kewarganegaraan adalah persoalan moral secara subjektif dan politik secara objektif. Secara subjektif setiap warganegara dinisbahkan menjadi pemilik atau pendukung keberadaan negara. Hal itu didasarkan pada salah-satu teori tujuan negara – seperti diajarkan Aristoteles dan yang sealiran dengannya seperti Dante, Epicurus hingga Thomas Aquinas, dan sebagaimana juga dianut oleh Mukadimah UUD 1945 yakni ‘untuk melindungi hajat kepentingan rakyat sebagai warganegara pendukungnya’. Sedangkan kedudukan objektifnya, secara politik bahwa setiap warganegara juga adalah menjadi alat pencapaian tujuan atau kepentingan negara dengan segala kompleksitasnya, sehingga diperlukan adanya aturan yang mengikat kuat berupa kewajiban-moral selain hak-hak dasarnya sebagai warganegara. Sejarah panjang di dalam praktik penyelenggaraan negara sejak purba hingga akhir modern, mengisahkan problematika fenomenal tarik-menarik antara cita-cita kemanusiaan dan tujuan kekuasaan semata, antara tujuan mulia negara dan residu kemunduran peradaban. Untuk itu, latar permasalahan studi ini dapat diketengahkan meliputi lima sub-tema pokok di dalam Pendidikan Kewarganegaraan di tanah air khususnya, yakni : 1) Penguatan makna pendidikan dalam perspektif keilmuan dan kebudayaan, sebagai tilikan filosofis; 2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan politik dalam sejarah pendidikan Indonesia, sebuah refleksi historis; 3) Tantangan dan problematika pendidikan kewarganegaraan dalam kekinian diantara Nasionalisme, Etnisitasisme dan Kosmopolitanisme, dalam acuan empiris; 4) Pengembangan aktualitas Kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter generasi muda pada lingkup sekolah dan masyarakat, sebagai kajian teoritis;

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

dan 5) Makna Pendidikan Kewarganegaraan Sosial dalam artefak kehidupan kultural masyarakat Sunda, sebagai penelusuran alternatif praksis yang dicari dalam studi ini.

### **1. Penguatan Makna Pendidikan dalam Perspektif Keilmuan dan Kebudayaan**

Pendidikan sebagai sebuah proses, sejatinya merupakan naluri kehidupan itu sendiri. Jika realitas selain manusia menampilkan pula pertanda tindakan belajar seperti yang dilakukan diri manusia – meski dapat dipastikan tanpa sadar akan tujuan atau terbatas pada kebutuhan dasarnya, yakni mempertahankan diri dari ancaman tantangan dan gangguan yang mengusik kehidupannya. Namun realitas adanya pola adaptasi yang dilakukan setiap makhluk selain diri manusia dalam mempersiapkan kekuatan, kemampuan menghindari bahaya yang mengancam dirinya hingga berakumulasi menjadi aktualitas pertahanan untuk kepentingan kelangsungan keberadaan hidupnya, pada dasarnya merupakan perilaku belajar. Bahwa tentu saja yang menjadikan sosok diri manusia mengatasi kemampuan makhluk selain jenis dirinya, adalah bukan lain dari keunggulan dalam membuat loncatan perubahan oleh potensi penyesuaian dan penciptaan yang dimilikinya. Tetapi meski dapat dikatakan yang menandakan diri manusia adalah sebagai hewan berpikir, yang dapat bertanya atas segala persoalan yang menjadi realitas di dalam kehidupannya, keberadaan diri manusia dalam komunitasnya hingga kuantitas tak terbatas tidaklah serta-merta menasbihkan kedudukan sama dengan sendirinya atas satu manusia dengan manusia lainnya. Langeveld (Rasyidin Dkk, 2007) menyebut manusia sebagai “*Homo Educandum*”, yakni makhluk yang memiliki potensi untuk belajar, diajari (dididik) dan belajar terus-menerus terutama oleh dan dengan dirinya sendiri. Sebab keberadaan kemuliaan dirinya sebagai manusia di atas sekalian makhluk yang diciptakan, karena ‘isi kepalanya’, tetapi beranjak lagi harkat yang bisa dicapai dari sesama dirinya sebagai umat manusia karena ‘integritasnya’, yakni potensi penciptaan pada ranah penyatuan antara kekuatan intelektual dengan

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendalaman pengalaman peran dirinya sebagai bagian dari umat manusia lainnya. Untuk kepentingan kehidupan bersama itulah, kesadaran luhur manusia mampu menemukan tujuan yang dapat disepakati dan mengikat semua diri manusia melalui cara-cara pengembangan potensi seturut dan setaraf dengan fitrahnya. Karena itu, pendidikan dalam maknanya sendiri, dan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya : disepakati untuk bermuara pada tujuan pencapaian terbentuknya budi baik atau watak, tabiat atau sekurang-kurangnya dapat dinyatakan sebagai sikap dan sifat warganegara yang baik (*good citizenship*).

Jika warganegara yang baik, atau berkarakter bukan lain daripada individu manusia yang memiliki diri sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani yang sehat dan matang secara moral, mental dan sosial. Kesehatan dan kematangan moral, mental dan sosial sebagai totalitas kepribadian dapat terbentuk melalui berbagai cara, pendekatan dan penghampiran proses pendidikan baik formal, informal, di sekolah, keluarga dan masyarakat. Ikhtiar pengembangan pendidikan moral di sekolah sebagai salah satu model pendekatan yang dapat dikontrol sekalipun, kerap dihadapkan pada ketidak hampiran dalam menggapai target pembentukan prilaku moral warganegara yang diharapkan, kecuali indikator pencapaian pengetahuan atau kesadaran kognitif-parsial. Aktualisasi moral pada ranah sikap dan prilaku nyata warganegara, tidak mudah diwujudkan baik dalam *setting* keluarga, sekolah dan masyarakat tanpa membangkitkan salah satu potensi dasar diri individu manusia, yakni *spirit* atau semangat dan ialah yang menguatkan semua isi dan kesadaran selain potensi intelektual. Dalam keseharian, dikaitkan dengan tuntutan kewajiban yang menjadi ruang aktualisasi praksisnya lajim disebut 'Etos'. Ialah 'kekuatan yang menggerakkan *spirit* menjadi isi di dalamnya, merupakan dasar bagi kehendak dan kemampuan untuk bertanggungjawab', boleh jadi terbentuk oleh kebiasaan, yang mengkristal menjadi konsistensi diri dalam memaknai peran dan keterkaitan dengan kehidupan bersama, baik dalam konteks sosial, budaya dan alam. Maka sebagai

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

‘*spirit of ..*’ bukan lagi sekedar kebenaran baku yang secara normatif telah final sebagai bagian dari kekayaan kultural dan peradaban, tetapi jawaban kontekstual atas apa yang harus menjadi pilihan benar dan baik dalam tindakan bagi kepentingan mulia tujuan hidup manusia dan kemanusiaan. Oleh sebab, ialah yang menggerakkan hati manusia, kekuatan yang menguatkan sebagai awal dan untuk pada akhirnya, yang dapat dan harus ditumbuhkan karenanya, agar diri manusia menjadi manusia sebagaimana harusnya, untuk menghampirinya harus ditumbuhkan sejak dari dalam prosesnya, tidak dari seperti memetik hasil akhirnya.

## **2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan Politik dalam Sejarah Pendidikan Indonesia**

Bahwa pendidikan politik berbasis penanaman nilai-moral yang bermuara pada pembentukan karakter manusia dalam ikatan kolektif *nation* Indonesia telah dimulai dan mengalami perkembangan seiring dinamika historis negara-bangsa dalam konteks perubahan dan progress politik dunia global yang menjadi lingkupnya. Perkembangan progres global dengan segala dimensinya, selain merupakan tantangan terhadap upaya pemeliharaan kekayaan, penguatan nilai dan citra cultural bangsa, juga dapat ditenggarai sebagai ancaman nyata terhadap pelemahan hingga penghilangan identitas nasional tiap satuan bangsa. Semakna dengan apa yang diungkapkan Branson (1999:14) dalam Winataputra & Budimansyah (2007:1) betapa “globalisasi memiliki potensi untuk mengembangkan atau sebaliknya menunda ..” apa yang diperjuangkan umat manusia dalam menjaga kelangsungan dan kehormatan hidup bersama dalam masyarakat, dalam ujud berbangsa dan bernegara – bahwa hal itu tentu bergantung pada kemampuan suatu bangsa dalam menentukan pilihan. Sementara faktanya, pelemahan identitas oleh eksese arus global kasat mata bukan saja menghinggapi warganegara muda hingga dewasa yang kurang beruntung mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga pada berbagai kalangan yang lebih bernasib baik mendapatkan fasilitas termasuk pendidikan yang diperlukan untuk

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengambil peran dalam jabatan dan kehormatan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika demikian, penyebab runtuhnya kesadaran dan berkurangnya kebanggaan akan harkat besar sebagai anak bangsa yang beradab dan bermartabat, dapat dialamatkan bukan pada tidak adanya pendidikan politik nasional, baik secara akademik dan kultural dalam kehidupan kemasyarakatan, sepanjang dinamika pembangunan dan pembaruan pendidikan di dalamnya yang terus digerakkan dari waktu ke waktu. Tetapi dapat dirasakan, kurang berhasil program *value and moral education* yang ada di dalam kurikulum persekolahan, dan secara eksplisit dilimpahkan pada pembelajaran PKn atau dalam sebutan sebelumnya: dari Budi Pekerti (1947), Pendidikan Budi Pekerti (1951), Civics (1957-1961), PKN (1962-1968), PMP (1975-1984), PPKn (1994), PS/PKPS (dalam KBK 2004), PKn di dalam KTSP 2006 dan kembali disebut PPKn melalui penetapan Kurikulum 2013, terentang pada sejumlah sebab yang dapat disadari sebagai “*unavoidable*”, (Winataputera) yakni sebagai penyimpangan yang tak terhindari, yang sejatinya dapat diapresiasi sebagai bagian dari dinamika historis perjalanan bangsa. Bahwa kenyataan terkini belum juga beranjak dari apa yang sudah disinyalir Winataputra (1982), yakni “ .. masih kurang atau tidak dipahaminya karakteristik mata pelajaran ini secara utuh, baik oleh guru mata pelajaran di sekolah lanjutan dan menengah .. ” tidak kecuali pada keadaan sekarang, termasuk juga para guru kelas di sekolah dasar yang tidak secara khusus merupakan guru bidang studi – berakar pada persoalan pembinaan mutu sumberdaya pendidikan yang terabaikan dalam rentang waktu yang lama. Hingga kenyataan pengelolaan mata pelajaran ini dari waktu ke waktu cenderung dilakukan menurut mudah dan praktisnya bagi kepentingan pelaksanaan tugas parsial pengajaran yang menjadi tanggungjawab formalnya. Maka hasilnya dapat dipastikan sama sekali tidak memberikan kekayaan pengalaman belajar yang diperlukan bagi pembentukan sikap dan kepribadian peserta-didik sebagai warganegara.

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kendati reformasi telah bergulir, dan pendidikan sebagai sokoguru pembangunan bangsa menjadi bagian penting lain dari agenda reformasi bangsa dan negara ini, setidaknya sebagaimana tercakup dalam Amandemen konstitusi hingga produk yuridis lain, antara lain UU Nomor 14 tahun 2004 yang bermakna strategis dalam turut meningkatkan standar profesi, selain mengatur peran dan kedudukan sumberdaya pendidikan untuk mendukung pencapaian tujuannya. Dalam kerangka itu, beberapa hal yang menjadi sebab lain tidak efektifnya pencapaian tujuan mata pelajaran ini, seperti yang dikemukakan Winataputera (1999) maupun Wahab dan Sapriya (2011), masih relevan untuk direfleksi ; bahwa terhadap empat kelemahan esensial mata pelajaran ini, (tiga diantaranya) yakni : 1) konseptualisasi, 2) penekanan berlebihan pada proses pendidikan moral *behavioristik*, dan indoktrinatif, hingga 3) ketidak konsistenan penjabaran berbagai dimensi tujuan ke dalam kurikulum PKn; seiring hajat reformasi, telah dilakukan pembenahan dan progres yang dicapai melalui berbagai kebijakan, termasuk pembaruan dan penyesuaian kurikulum sejak digulirkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK-2004) hingga Kurikulum Standar Isi dan Standar Proses yang ditetapkan BSNP, yang telah mengacu pada tuntutan yuridis dan *spirit* otonomi daerah, yakni melalui pengembangan Kurikulum yang harus terbentuk pada satuan lokal dan potensial sekolah masing-masing – kecuali isyu kelemahan yang keempat, yakni “Keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya” sebagai ranah praksis, menjadi sangat bergantung pada ‘apa yang sebaiknya dan sedapatnya harus dilakukan’ setiap pengembang kurikulum dalam intensitasnya di lapangan, yakni para guru. Untuk itu, kecuali penguatan konseptual keilmuan yang menjadi basisnya – di dalam kerangka Ilmu-ilmu Sosial : khususnya ilmu politik dan praksis hukum ketatanegaraan dalam dimensi nasional dan global, segenap potensi dan peluang ikhtiar pendidikan, terutama melalui proses kurikulum di sekolah ataupun institusi sosial lainnya dapat direorientasikan pada keberadaan makna dan sumbangan nyata

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kehidupan budaya lokal yang ada di sekitarnya. Sehingga proses dan hasil Pendidikan Kewarganegaraan, baik secara konseptual keilmuan, dan *moral behavioral* yang menjadi harapan, dapat terbentuk secara alamiah karena berbagai dukungan penguatan dari lingkup sosial kulturalnya.

Bahwa kesadaran sebagai warganegara, dimanapun menjadi bagian penting upaya negara membangun kekuatan politik dan moralitas nasional sebagai pendukung kelangsungan hidup *menegara*. Tidak kecuali itu, upaya pendidikan yang bertujuan menanamkan moralitas kebersamaan telah jauh dilakukan bahkan sejak persekolahan era kolonial hingga awal kemerdekaan. Merunut perjalanan panjang dinamika keberadaan penyelenggaraan pendidikan politik dan moral pada persekolahan di tanah air, dapat ditelusur jejak historis penyebutan nama mata pelajaran ini, setidaknya sejak kurikulum nasional pertama disebut Rencana Pelajaran Terurai tahun 1947 hingga pemerintah menemukan rasio terbaiknya untuk mengembalikan pengembangan kurikulum ke tangan guru dan sekolah melalui KTSP tahun 2006. Perubahan nama mata pelajaran tersebut dari waktu ke waktu dipahami sebagai bagian dinamik perkembangan politik negara, pembangunan masyarakat dan bangsa, yang secara konseptual dan substansial merupakan pilihan progress jamannya. Karena itu, merefleksi keberhasilan dan kurangnya tetap penting dilakukan terkait realitas kekinian dan proyeksi ke depan, baik konsep hingga penerapannya dalam praktik kewarganegaraan di persekolahan maupun lingkungan masyarakat luas pendukungnya.

### **3. Tantangan dan Problematika Pendidikan Kewarganegaraan dalam kekinian diantara Nasionalisme, Etnisitasisme dan Kosmopolitanisme**

Bahwa memasuki era kebersatuan dunia, yang diimpresikan oleh semakin pudarnya batas manual otoritas dan wilayah negara hingga entitas budaya di dalamnya, Pendidikan Kewarganegaraan pada tiap negara-bangsa di semua sudut bumi saat ini, memasuki momentum perluasan nuansa oleh terbukanya spirit dan rasionalitas global yang menjadi ciri jaman ini. Meski di atas perkembangan itu, jauh

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ke dalam substansi PKN tetaplah menjadi sandaran utama instrumentasi pelestarian dan penguatan *etos* dan *entitas* jatidiri bangsa. Maknanya, betapapun semua bangsa tak dapat menolak arus besar penyatuan dunia, tugas moral kesadaran bernegara-bangsa di sudut manapun akan jatuh pada pilihan turut bagian mewarnai keragaman dunia dalam kebersamaan meski dengan keberbedaan yang ada. Dengan demikian, meniti kembali warna dan rupa lokal Nusantara menjadi langkah strategis nasional pengokohan citra dan jatidiri bangsa.

Persoalannya, merefleksi perkembangan terakhir denyut nadi *spirit* dan aktualitas sosial politik yang merupakan citra kultural manusia berbangsa, bernegara dalam wadah NKRI hingga dua pertiga abad pasca proklamasi; tidak saja sebagaimana terjadi di pedalaman, di pedesaan bahkan dikota besar dan komunitas manusia lebih terdidik dari pelajar hingga mahasiswa; dari Satuan Polisi Pamong Praja hingga yang mulia anggota badan legislatif, kerap masih mencitrakan 'keterseokan' pada peradaban purba. Meski realitas menggembirakan di sisi lain patut disyukuri bahwa dinamika kultural politik di tanah air telah dapat dikatakan melangkah jauh lebih baik, dalam arti lebih terbuka dibanding sebelum reformasi. Seiring dengan itu, cikal bakal generasi cerdas yang akan mengusung dan melanjutkan pada capaian lebih maju terus lahir dan dilahirkan ditengah kekosongan sisa kultural masa lalunya. Namun hidup berbangsa dan bernegara secara bermutu bersama tidaklah cukup disandarkan pada raihan sedikit dari manusia Indonesia yang mampu mewakili prestasi bangsa dalam persaingan memajukan dunia dan peradaban di dalamnya. Sebagai sebuah bangsa yang besar, anak bangsa ini telah biasa dan bisa belajar dari kemajuan peradaban besar umat manusia, sebagaimana telah diperankan pendahulu dari masa ke masa yang puncaknya tertorehkan menjadi dasar dan tujuan pendirian negara (Alinea IV Pembukaan UUD 1945). Realitasnya, sebagai sebuah negara-bangsa yang berlimpah sumberdaya alam dan manusia, tidak serta merta menjadikan negara-bangsa ini besar pula dalam arti unggul atau memiliki

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kemampuan yang meyakinkan dalam mengatasi tantangan besar dunia dan jamannya. Setelah sejarah kelam masa silamnya, kemerdekaan yang dicapai yang mestinya dapat membawa kepada keadaan yang lebih bermartabat, terlepas dari kebodohan kolektif, kemiskinan masal, dsb., masih harus terus diperjuangkan dengan segenap kekuatan di tengah potensi konflik dan keragaman yang menjadi salah satu ciri kebesarannya. Peluang dan tantangannya, kecuali belajar dari jejak maju pengayuh perkembangan global dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai bangsa lain, adalah juga terhadap etos dan semangat kulturalnya. Meski jatidiri nasional yang kita warisi tidak kurang bernas, tetapi nyata dan massif, bahwa diri kita sekarang yang tengah atausudah belajar sebagai warganegara dewasa; mulai dari sebagai pemuda, pelajar hingga mahasiswa, buruh, pegawai atau wiraswasta, perseorangan atau kolektif; dari sekedar orang biasa hingga termasuk elite yang tersebar pada semua profesi dan tingkatan perjuangan; jika dihadapkan pada perselisihan, persaingan dan konflik yang tak terelakan, kerap ujungnya menjadi perseteruan yang berkepajangan bahkan tak berkesudahan. Mendapati potret buram wajah diri bangsa sebagaimana tergambar di atas, tidak bisa tidak merefleksikan sosok kepemimpinan sebuah generasi yang kemudian diwarisi penerusnya. Maka buah jadinya, dalam unjuk kepiawaian dan kepahlawanan yang dilakukan para pemuda, pelajar dan mahasiswa kita di kelas dan kampus tempatnya belajar adalah tawuran dan adujotos yang tidak bertujuan, tidak kecuali para remaja perempuan di dalamnya. Potret buram tersebut, merefleksikan integritas kepemimpinan sebagai rujukan pendidikan informal dan sekolah sebagai institusi formal dalam menjaga, memelihara, melestarikan dan meningkatkan mutu kultural kehidupan di hadapan pada tantangan, perhatian dan penyadaran bersama untuk mencari kembali kekuatan bangsa – betapapun keburaman yang tampak dimungkinkan sama besarnya dengan keadaan sebaliknya yang tidak terlihat, akan tetapi seandainya lebih kecil sekalipun dari yang bisa

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dirasakan tentu tidak untuk dibiarkan, sepanjang nafas dalam helaan : kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan menjadi jalan panjang memahami kehidupan.

Bahwa pendidikan formal sebagai salah satu instrumentasi kekuatan negara-bangsa, telah menjadi wahana yang berperan besar dalam mewariskan : identitas, nilai dan cita-cita kultural kini dan ke depan. Tetapi ketidak berhasilan tak dapat dielakan senantiasa terlihat, ketika pendidikan yang ada kehilangan *ruhnya* sebagai alat sekaligus tujuan pembentukan watak (*medium is massage*). Memberai kembali dari mana dan bagaimana pembentukan karakter dalam rangka membangun citradiri bangsa melalui pendidikan, sejatinya menjadi pencarian yang harus terus dilakukan pada peluang yang paling mungkin, yakni mulai dari masa pembentukan pada lingkungan yang paling awal dalam kehidupan seorang anak, di mana masa sosialisasi seiring fase tumbuh-kembang berlangsung seiring pencarian dan pembentukan identitas sebagai seorang pribadi, hingga menjadi warganegara yang matang. Untuk itu, pendekatan multi dimensi, lintas area secara *meta*-sinergis dalam satu model program terpadu dan berkelanjutan, melalui pengorganisasian kurikulum sekolah bernuansa sosial kultural yang menjadi lingkup sekolah dan keluarga peserta didik berada dapat dilakukan menjadi bagian lanjut studi ini.

Negara-bangsa Nusantara telah dilahirkan oleh jamannya, menjadi sebuah pilihan seiring pergaulan modern pasca kolonialisme (lama) berakhir di beberapa belahan bumi, khususnya bangsa Asia dan Afrika. Indonesia sebagai nama yang dipilih dan dilahirkan untuk mempersatukan komunitas manusia nusantara baru, dalam konsep kedirian negara-bangsanya telah memilih bentuk organisasi modern dengan berasaskan nasionalisme yang saat itu tengah menjadi *trend* kebangkitan dan *modus* perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang mengungkungnya. Di beberapa negara bangsa eks jajahan, nasionalisme mengerucut menjadi ikon perlawanan, dan antitesa yang mendapat justifikasi dunia untuk menghentikan kolonialisme. Di negara-negara bangsa koloni sendiri, nasionalisme terpelihara dan diaksentuasikan

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melalui spirit perluasan kekuasaan melalui penguasaan tanah dan bangsa lain (*expansionisme*) sebagai sumber penguatan kejayaan dan kesejahteraan internal negara-bangsanya. Dengan demikian, tanpa menjadi bersifat *chauvinistic* sekalipun semangat kebangsaan pada setiap negara bangsa yang mulai keluar dari Daratan Eropa telah menjadi ancaman bagi negara bangsa lain yang terlambat dalam melihat ancaman negatif dari perhubungan antar bangsa. Nasionalisme modern yang dianut negara bangsa baru, dan berhasil dibangun di atas kemerdekaannya, berkesempatan memilih akal sehat untuk tidak meniru praksis nasionalisme para koloni yang telah menindasnya, dengan mencitakan masa depan dunia yang lebih berkeadaban dan berkeadilan. Meski demikian, sejak nasionalisme baru menggelora mengantarkan spirit awal kemerdekaan, kekhawatiran akan kembalinya kolonialisme dan imperialisme baru disadari dan menjadi wacana pendidikan politik kebangsaan di tanah air, dan seiring perjalanan meniti ‘jembatan emas’ kemerdekaanpun berlalu meninggalkan waktu demi waktu, *trend* kemajuan dunia baru membawa serta ancaman besar baru tak terelakan bernama globalisasi. Kendati neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang dicemaskan Sukarno jelas tidak pernah mendeklarasikan sebutan dirinya seperti apa adanya dalam realitasnya. Nasionalisme negara-bangsa baru merdeka termasuk Indonesia telah lama tergerus, selain yang tertinggal dalam buku pelajaran sekolah, dan orasi politik tak berakar. Kecuali persoalan mendasar diantara pergeseran kultural dan persaingan kekuatan politik di dalam, yang menjadi sebab negara bangsa ini tidak berhasil meletakkan integralisme sebagai dasar perjuangannya, adalah tekanan luar yang sejak dalam wajah lama hingga berganti dengan *trend* barunya tak dapat dihindarkan. Alih-alih, membangun kekuatan sendiri terlepas dari dunia adalah mustahil, sesuai dengan cita-cita politik sebagaimana tertuang dalam akta pendirian negara bangsa ini, bahwa menjadi bagian dari dunia adalah sebuah keniscayaan, dan mampu mengatasi berbagai ekses negatif di dalamnya itulan satu-satunya pilihan. Untuk itu, menyertakan diri sebagai bagian

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dari dunia *cosmopolite* adalah langkah elegan, dan namun seiring itu melakukan pencarian dan penguatan terhadap akar kultural nasional berbasis kekayaan-ragaman etnik menjadi bagian penting yang tak pula dapat ditanggalkan.

Bahwa pudarnya nasionalisme, selain dapat ditempatkan pada *determinant* yang sangat kuat bersifat eksternal, harus juga dicari pada realitas berkurangnya andalan internal, yakni : spirit dan kesadaran kolektif pada bangunan kultural anak bangsa. Untuk itu, membangun kembali nasionalisme masih tetap menjadi kepentingan eksis sebuah negara-bangsa, terutama menghadapi arus negatif globalisme yang terus mengancam – sementara hajat menjadi bagian dari dunia kosmopolit tak dapat tidak menjadi pilihan, penguatan identitas dan entitas nasional tak dapat tidak menjadi salah satu andalan. Bahwa aktualisasi etos kebangsaan, lebih dari sekedar unjuk keberpihakan sikap pada pengukuhan simbolik, tetapi diprediksikan mengeras dan harus mampu menguras segala daya untuk mempertahankan makna yang lebih besar bagi kepentingan strategis bangsa. Menumbuhkan etos kebangsaan sebagai kristalisasi *spirit* dan kesadaran yang harus terbentuk, jelas tidaklah semudah memainkan layangan, seperti yang bisa terjadi dan dilakukan melalui *event* permainan dan ritual pertandingan persahabatan antar bangsa. Sekedar meresonansi keberpihakan simbolik terhadap identitas dan entitas setiap diri sebagai anak bangsa, dipastikan dapat mudah terjadi. Tetapi menunjukkan esensi kekuatan, dalam ujud ketangguhan sikap dan keberanian memilih keputusan atau tindakan bagi kemuliaan negara dan bangsa di atas perhitungan lain dari pada itu, hanya itulah tiket yang dibutuhkan untuk penyelamatan negara-bangsa, seperti yang telah dilakukan para perintis perjuangan kemerdekaan dan revolusi hingga reformasi. Tidak kecuali di tanah air, dan bagi bangsa-bangsa yang terlambat berkembang, membangun kekuatan ke dalam adalah pilihan utama dan pertama untuk kemudian siap memasuki tantangan dunia yang terus melaju menjadi bagian dari satu dunia yang terbuka dalam persaingan dan pencapaian tujuan bersama yang sehat.

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

#### **4. Pengembangan Aktualitas Kewarganegaraan sebagai dasar pembentukan karakter generasi muda pada lingkup sekolah dan masyarakat**

Bahwa karakter atau watak, disepakati harus menjadi muara dari urgensi proses pendidikan. Itu karenanya, sejak awal pendirian negara-bangsa ini; Sukarno, sebagai salah satu bapak bangsa ini tidak termasuk terlambat dalam melantangkan pentingnya “*National Charracter Building*”, demikian pula oleh rejim yang menggantikannya melalui pembangunan ordebaru, kendati dihindari penggunaan istilah yang sama. Melalui konsep “Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya .. dst.”, dan implementasinya yang diturunkan ke dalam doktrin “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)”, sejatinya merupakan modes lain dari babak lanjut upaya penjelmaan karakter atau watak manusia Indonesia yang diharapkan, baik secara kurikuler dan politik di dalam kerangka penyelenggaraan negara. Memasuki era ketiga; pasca reformasi, wacana kepentingan dan kesadaran kolektif atas *National Charracter Building* kembali mencuat bagai ‘gadis sampul’ yang menarik banyak kalangan. Akan tetapi, sejauh dinamika politik dan kultural sejak republik ini berdiri hingga reformasi alot berlangsung, tidak terlihat titik tumpu antara visi ideal politik nasional di satu sisi dan realitas kepentingan praktis yang senantiasa menjadi bahan pertarungan dengan potensi kultural di sisi lainnya. Terlebih dihadapkan pada kompleksitas problematika loncatan kekinian yang terus menggerus dan menantang – diantara pengalaman mengenaskan oleh berbagai kekalahan di dalam persaingan dengan kemajuan dan kemakmuran negara/bangsa lain. Setiap kekalahan sebagaimana terjadi pada kehidupan semua bangsa dan jaman manapun, sesungguhnya tidak sukar ditemukan akar permasalahannya. Bahwa apa lagi yang tidak dimiliki oleh sebuah negara-bangsa yang tanah ait dan manusianya tidak kurang diliputi kekayaan tak bertepi, kecuali mental kolektifnya sebagai sebuah bangsa, dan itu tak bisa dibangun tanpa bersandar pada satu-satunya instrument penting di dalam gerak maju peradaban dan kebudayaan, bernama pendidikan.

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Karakter atau watak, hanyalah label terminal dari tujuan akhir pembelajaran dan proses “*ber-PKn*” (Aziz Wahab) besertanya dalam lingkup sekolah atau studi kemasyarakatan. Untuk mendorong pencapaian terbentuknya ujud perilaku dalam keseharian secara bermakna, instrumentasi pendidikan secara mekanik; terbukti tidak pernah memenuhi cukup alasan untuk mengklaim keberhasilan dalam mencapai target utamanya, seperti yang tercantumkan pada sebutan : “Manusia Baru Indonesia” di masa ordelama, “Pancasilais sejati dan Manusia Indonesia seutuhnya” di masa ordebaru, hingga pencarian kembali “Manusia Indonesia baru” yang digulir spirit era reformasi. Hal itu dimungkinkan, karena penempatan tujuan ideal pendidikan diletakkan pada konstruksi akhir dan menjadi harapan di depan, tidak pada hasil proses yang kongkrit saat program pembelajaran atau nama pendidikan berlangsung. Alih-alih mengukur hasil akhir dalam ujud indikator tersebut, tidak sertamerta pula menjadi kemampuan guru atau sekolah hingga pemerintah sekalipun melalui kementerian / dinas pendidikan. Sebab hasil akhir, senantiasa kongkrit terlahir pada realitas kecenderungan perilaku kolektif dan perubahan budaya masyarakat; manis dan pahitnya, indah dan jelek hingga baik dan buruknya ada dalam performansi kita bersama. Untuk itu, merancang keberhasilan pendidikan yang bermuara pada perubahan perilaku kolektif dalam kehidupan masyarakat, dimungkinkan melalui pengembangan apresiasi nilai, pemberdayaan, pengayaan, dan penguatan kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pengembangan pendekatan sosial-kultural; sejauh konstruks, isi dan metodologi pembelajaran hingga sosok personal guru yang menjadi aktornya, menjadi kata kunci penting di dalam menghampiri terjadinya perubahan perilaku warganegara yang diharapkan dalam sebuah komunitas, mulai dari lingkup sekolah hingga satuan kelompok masyarakat yang lebih luas.

Bahwa pada seburuk realitas personal yang tak dapat ditampikan adanya menghinggapi performansi sebagian kecil atau besar anak bangsa ini; di tengah krisis

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

integritas nasional yang melanda kehidupan kolektifnya, dapat dipastikan masih tersisa adanya etos kebangsaan yang melekat pada cita dan citra dirinya. Hal itu mudah terlihat dari masih tersedianya ruang pemihakan diri terhadap bagian dari ikon nasional di berbagai lapangan menghadapi perjuangan dalam ritus persaingan antar negara/bangsa. Tetapi kemauan dan kemampuan mengusung cita dan citra secara eksistensial dalam ujud ‘nyala’ nasionalisme saja menjadi tidak mencukupi, terlebih sebagai luapan nasionalisme dalam perujudannya yang hinggar bingar. Sebab hal itu sangat mungkin bersifat parsial, temporer dan tidak mengikat pada entitas yang dapat mengangkat hingga menguatkan jatidiri bangsa yang diperlukan. Penguatan identitas dan integritas nasional yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti pada kemampuan menghalau kekuatan destruktif yang datang dari dalam hingga dari luar; terentang pada proses pewujudan dan pengembangan sosok utuh-penuh mental yang terakumulasi sebagai *spirit* yang menjelma dalam atau sebagai “aktualitas kewarganegaraan”. Dengan demikian, betapapun bernyalanya etos kebangsaan dan itu diperlukan adanya pada setiap dada dan hati anak bangsa, menjadi ‘berkurang artinya’ jika tidak memberikan sumbangan yang diperlukan oleh isi di dalamnya, sejenis *virus* yang dapat menjadi garansi bagi sebuah tindak keberpihakan warganegara kepada kepentingan besar negaranya.

Aktualitas Kewarganegaraan, sebagai *spirit* adanya dimaksudkan tidaklah menjadi sekedar teks normatif diatas kertas dari manapun sumbernya, yang dengan gamblang mudah dikonstruksi sebagai bahan pengetahuan, untuk dihapalkan dan dipahami dengan harapan akhir dapat dihayati, hingga disadari: seperti nilai Moral Pancasila yang dirumuskan di dalam 36 – 45 butir P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai disebut ‘Eka Prasetya Pancakarsa’. Bulir bernas yang secara konseptual merupakan rekonstruksi dari realitas kultural yang telah ada dalam kehidupan praksis bangsa ini sekalipun, terbukti tinggal sebagai sebuah harapan bagi sebuah proses pembelajaran yang tidak mudah didekati, jika tanpa *spirit* berbasis

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*need* internal yang mendasar berupa kehendak. *Spirit* adalah aktualisasi *psychis* yang terbentuk melalui prakondisi yang diciptakan di dalam interaksi pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang memungkinkan setiap satuan tujuan belajar (standar kompetensi) mudah dan menyenangkan untuk dilakukan melalui peniruan dan pembiasaan secara berulang dan berkelanjutan oleh subjek belajar.

Sejumlah studi berkenaan dengan sosok utuh program pendidikan kewarganegaraan baik dalam konteks sebagaimana disebut *Civic Education* seperti adanya di dalam kurikulum persekolahan di tanah air, hingga kehidupan masyarakat luas yang diartikan tersendiri dalam sebutan *Citizenship Education*, telah mulai dilakukan kembali menjelang pergantian *millenium*, seiring tuntutan reflektif perkembangan global sebagai gejala penyatuan dunia di berbagai negara. Beberapa studi yang menjadi tonggak penting penyatuan pandangan dunia dalam melihat Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif internasional, dipelopori Cogan sejak awal tahun 1990-an, hingga Cheng dan Kerr pada akhir dekade tersebut (Winataputra & Budimansyah, 2007:2-7).

### **5. Makna Pendidikan Kewarganegaraan Sosial dalam Artefak Kehidupan Kultural Sunda**

Mencermati dan mengapresiasi hasil studi para ahli dalam skala dunia tersebut, serta mempertautkannya dengan perkembangan dalam konteks ke-Indonesiaan. Harus dikatakan, bahwa hidup berbangsa dan bernegara bagi segenap komunitas kultural Nusantara tidaklah baru dimulai pada pertengahan abad 20, ketika sejarah kolonialisme harus berakhir, dan sejarah baru kebangkitan bangsa ini memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk modern organisasi puncak kenegaraan-bangsaan. Berbekal sejarah kulturalnya, hidup baru dalam wadah kenegaraan-bangsaan anak Nusantara sejak proklamasi, fase revolusi, orde pembangunan dan reformasi secara berkelanjutan mestinya bukan hanya menapak pengalaman tapi juga pembelajaran untuk menggapai tujuan yang menjadi impian sadarnya, yakni seraya

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melepaskan diri dari kekuatan kolonialisme, berperanserta aktif dalam menciptakan ketertiban dunia yang adil dan abadi; adalah terutama mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kesejahteraan dan kemuliaan sebagai sebuah bangsa yang melindungi hajat hidup kemanusiaan di dalamnya menjadi jalan terang yang ada bukan saja di atas kertas sekedar sebuah cita. Untuk itu, sebuah ikhtiar bernama pendidikan dan *moral behavior* sebagai hasil akhirnya, khususnya dalam lingkup formal istitusi sekolah dengan segala instrument yang dimilikinya, hanya mungkin mendekati sasaran yang ingin dicapainya, dengan berpijak pada pemahaman dasar terhadap proses tumbuh-kembang manusia kecuali sebagai *zoon politicon* (Aristoteles), adalah juga sebagai *zoon social-cultural*. Karena itu rekonstruksi karakter kewarganegaraan, tanpa harus mengurangi kepentingan pengembangan nalar-ilmiah dalam perspektif politik nasional hingga global, adalah sangat penting meletakkan sosok utuh kedirian individu dan sosialnya dari ranah kultural lokalnya. Tanpa itu, seorang individu dalam kehampaan cita dan cinta dari lingkup sosialnya, dapat dipastikan tidak akan cukup memiliki *etos* nasional yang kuat, yang diperlukan dalam pertarungan dan pertaruhan hubungan antar bangsa yang dapat memudarkan identitas.

Sebagai salah satu rumpun sub-etnik besar dalam jajaran penyangga keragaman budaya Nusantara, komunitas manusia Sunda di Jawa Barat, khususnya Priangan, seiring perjalanan historis jauh dimasa pra-kolonial, hingga awal kemerdekaan menunjukkan sejumlah catatan dan sumbangan yang tidak kecil dalam pembentukan sejarah nasional Indonesia. Hal itu, boleh jadi, selain dialasi faktor geografis-strategis, perkembangan demografis dan sosok kultural di dalamnya, sejauh catatan peristiwa yang ditinggalkannya, menunjukkan mutu hubungan dan keberadaban yang cukup representatif sebagai anak bangsa pemilik sub-kultur Nusantara. Tanpa mengecilkan peran historis komunitas kultural etnik lain pendukung *Kebhinnekaan* Nusantara dalam kesatuan Indonesia, penetapan pilihan *setting* lokasi studi awal di Jawa barat dan komunitas kultural Sunda Priangan

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

khususnya dalam kesempatan ini, selain pertimbangan subjektif peneliti, secara objektif : Bandung kecuali merupakan sentra komunitas kultur, juga menorehkan catatan historis yang kuat sebagai barometer politik perjuangan kebangsaan di masa pra-kemerdekaan hingga beberapa dekade sesudahnya. Hal itu dimungkinkan, karena Bandung telah menjadi kawah *candradimuka*-nya kaum muda pilihan dari berbagai sudut Nusantara yang datang untuk belajar, setidaknya mulai pada tingkat MULO, HBS dan THS (ITB) di tahun 1920-an hingga pasca kemerdekaan. Tumbuh-kembangnya nasionalisme sejak pra dan awal kemerdekaan di kalangan kaum muda terpelajar dalam keragaman etnik di Bandung khususnya, jelas tak terlepas dari spirit kultural yang hidup dan menjadi latar proses penerimaan dan pembentukan nasionalisme dan patriotisme Indonesia, yang akar dasarnya mendapatkan persemaian dan pengembangan sejalan dengan citra dan cita kultural masyarakat Sunda Jawabarat dalam hubungan konfiguratif dengan aneka sub-kultur Nusantara lainnya. Untuk itu, sejauh data deskriptif temuan Proyek Pengkajian Kebudayaan Nusantara yang ada sebagai hasil kerja riset rintisan Proyek Sundanologi di Jawa Barat khususnya, dan yang setara pada pusat-pusat pemeliharaan dan pengkajian kebudayaan lokal di daratan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok dan lainnya dapat menjadi sumber rujukan dan perbandingan.

Karena itu, terkait dengan kedudukan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ‘ujung tombak’ Sistem Pendidikan Nasional pemikiran dan pengkajian terhadap kebermaknaan mata pelajaran ini menarik untuk terus dilakukan seiring perkembangan dan perubahan baik kurikulum di persekolahan maupun kehidupan politik kemasyarakatan yang melingkupinya. Bahwa sebagai *Civic Education* yang ada di dalam kurikulum persekolahan, sering kali PKn hanya dipandang sebagai pelajaran sekolah masa kanak-kanak, terutama pada kalangan yang beroleh kesempatan pendidikan sekolah di masanya, dan tentu tidak bagi sebagian lain yang tidak mengalaminya – kecuali pendidikan di dalam keluarga dan pendidikan

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekeluargaan di dalam komunitas kultural tradisional masyarakatnya. Sementara PKn dalam makna sebagai *Citizenship Education* yang ada di tengah kehidupan masyarakat dalam keanekaannya, sungguhpun ada belum mendapat apresiasi sebagai bagian integral pendidikan politik kenegara-bangsa. Sementara di sisi lainnya, di tengah kehidupan praksis politik kenegaraan kita, sering pula kalangan elit politik menyadari keperluan pendidikan politik kenegara-bangsa yang ada dalam kemasam PKn, yang oleh Cogan (1999) disebut sebagai *Citizenship Education*. Selibhnya, PKn sebagai pendidikan politik dan nilai di dalamnya, secara teoritik harus memberikan pijakan dan keyakinan untuk saling menguatkan, bahwa menjadi bagian dari kemajuan global (kosmopolit) bagi setiap bangsa adalah hanya jika mampu berpijak pada identitas dan *spirit* nasional. Dibalik itu, *spirit* nasionalisme dalam kemajemukan Indonesia menyuruk jauh akarnya pada etnisitasme yang sehat – sebagaimana *nasionalisme* dikatakan Sukarno bukan *chauvinisme*, etnisitasme bukanlah pula sekedar etnisisme terlebih ‘etnosentrisme’. Dengan demikian, kepentingan studi ini mengangkat artefak kehidupan kultural etnik lokal Sunda diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari penguatan akar budaya Nusantara sebagai jati-diri bangsa Indonesia di tengah kancah global.

## **B. FOKUS MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN**

Adapun fokus masalah, tujuan, implementasidan kebermaknaan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

### **1. Fokus Masalah**

Bahwa pendidikan politik nasional, apapun sebutannya jelas selain bersifat konsepsional harus kontekstual dengan denyut nadi kehidupan masyarakat yang menjadi lingkupnya. Sebagai anak bangsa yang besar, manusia Indonesia bukanlah bangsa yang baru mengenal keberadaban pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945. Betapa hidup berbangsa dan bernegara dalam satuan kecil sudahlah terentang di era kejayaan Nusantara, lebih dari itu hidup berkebudayaan dalam tata masyarakat dan

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

negara jauh pula bangsa ini dengan cemerlang mampu melakukan pada jamannya. Dengan demikian, membangun kembali kebanggaan dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana ada menjadi salah satu tujuan sentral kurikulum sekolah dan kegiatan sosial politik kenegaraan, tidak dapat hanya disandarkan pada pendekatan pendidikan politik. Bahwa hal itu merupakan salah satu tujuan strategis di dalam kerangka politik kenegaraan adalah sah, tetapi target mutu perilaku yang diharapkan terbentuk dari setiap warganegara tidaklah bermuara pada terbentuknya sikap politik semata, melainkan sikap kultural sebagai dasarnya dengan ketaatan moral di dalamnya. Karena aktualisasi sikap politik warganegara yang diharapkan bukan saja melek-tahu atau cerdas (*intelegent*) melalui pencapaian target *civic knowledge* dan *civics skill*, yakni terampil (*participation*) untuk berbuat sesuatu tanpa adanya semangat dan kesadaran (*ethos*), yang menjadi akar dan sikap dasar kemampuan bertanggungjawab (*responsibility*) dirinya sebagai warganegara. Persoalan besarnya, jika pengetahuan dapat ditambah, kecerdasan dapat diasah, keterampilan dapat pula dilatihkan melalui pengulangan terprogram, sikap bertanggungjawab tidaklah dapat diajarkan untuk kemudian diturut sebagai kewajiban hukum positif. Bahwa sebanyak pelanggar hukum di dunia ini bukanlah anak-anak kecil, juga bukan warganegara dewasa yang tidak takut pada hukum, tetapi sadar bahwa kesadaran hukum saja hanya beralamat tidak menguntungkan dirinya – jika dengan melanggarnya justru keuntungan berlipat dengan mudah didapat. Kesadaran hukum menjadi sebuah kebodohan, jika di dalam diri sebagai pribadi dan jauh di lubuk hatinya sebagai anak manusia tidak terdapat sekurang-kurangnya *ethos*, tidak cukup sekedar pengetahuan moral tentang apa yang baik dan buruk. Tetapi kesadaran besar untuk mau dan mampu berkorban demi kemanfaatan dan kemaslahatan hidup *mengada* bersama dalam satuan masyarakat, lingkup luasnya bangsa dan negara.

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk itu, lingkup studi ini dapat direntangkan mulai dari penelusuran konseptual-teoritik hingga praksis pengembangan nilai-moral kewarganegaraan secara etnografis pada lokus kultural masyarakat Sunda di “Tatar barat” Jawa. Langkah konseptual-teoritik (*horizontal*) dilakukan untuk menemu-kembangkan kembali sikap moral (etos) kewarganegaraan (*citizenship*) sebagai *spirit*, dalam arti semangat dan fungsinya sebagai potensi dasar yang harus terbentuk menjadi pilihan nalar (*awareness*) dan sikap individu di dalam merespons segala persoalan yang melibatkan kedudukan dan peran dirinya sebagai warganegara di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang telah ada mulai dalam kehidupan tradisional sejak masa *kadatuan* Nusantara hingga perkembangan modern sesudah merdeka. Rekonstruksi konseptual secara teoritik dilakukan mulai dari studi kepustakaan (*literature*), sejauh deskripsi dan hasil studi yang telah dilakukan berkenaan dengan etos baik secara falsafi dan kultural dalam lingkup kehidupan sosial etnik-lokal Sunda; diskusi dan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh personal (lokal & nasional) mewakili figur berlatar sosial-kultural etnik Sunda, baik sebagai bagian dari subjek penelitian maupun kedudukan dalam keparannya sebagai pemerhati dan praktisi kebudayaan daerah (Sundanologi); hingga pengamatan berperan-serta pada sejumlah situs kehidupan (kolektif) tradisional masyarakat Sunda sebagai *mentifact* dan *sociofact* yang masih terpelihara adanya dalam satuan-kecil komunitas / kampung adat di wilayah geografis Jawa barat termasuk Banten. Untuk jelasnya, pengembangan konseptualisasi teoritik studi ini dapat difokuskan ke dalam rumusan pertanyaan :

- 1) Bagaimanakah konsep nilai-moral yang ada pada sejumlah simbol *bilief* system masyarakat yang terdapat dalam sejumlah artefak kehidupan sosial kultural tradisional Sunda memberikan makna dan pertanda (*semiotik*) pada tujuan pendidikan Kewarganegaraan ?
- 2) Bagaimana ragam artikulasi muatan nilai moral yang hidup dalam ujaran lisan Sunda menjadi tindakan kultural dalam perspektif kehidupan politik

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat pendukung system budaya lokal, baik sebagai etika politik maupun semangat dan kesadaran kewarganegaraan manusia / masyarakat Sunda ?

- 3) Bagaimanakah implementasi model penanaman dan pengembangan nilai-moral kewarganegaraan sebagai alat dan tujuan ‘pendidikan politik’ baik formal dalam kurikulum persekolahan dan non-formal organisasi kemasyarakatan berbasis kearifan lokal Sunda di Jawa Barat ?

## 2. Tujuan dan Implikasi Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini dikemukakan sebagai deskripsi pencarian untuk memperoleh gambaran baik teoritik dan praksis sebagai berikut :

### a. Teoritik :

- 1) Konstruksi dasar konseptual-teoritik semangat dan kesadaran kewarganegaraan sebagai sasaran antara pembentukan moralitas-diri, baik sebagai pribadi dalam hubungan dengan (proyeksi) pengembangan karakter warganegara di dalam lingkup sosial, mulai di dalam keluarga, sekolah dan hubungan sosial yang lebih luas di masyarakat yang tercermin dalam ragam-tanda budaya Sunda
- 2) Ragam artikulasi muatan nilai moral yang hidup dalam ujaran lisan Sunda menjadi tindakan kultural dalam perspektif kehidupan politik masyarakat pendukung system budaya lokal, baik sebagai etika politik maupun semangat dan kesadaran kewarganegaraan manusia / masyarakat Sunda ?
- 3) Model implementasi pembelajaran PKn, baik melalui proses kurikulum di persekolahan hingga aktivitas organisasi politik kemasyarakatan dan budaya

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

*NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lokal, kaitannya dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia berbasis harmoni dalam konfigurasi nasional dan perspektif global.

#### **b. Praksis :**

Seiring pencapaian tujuan di atas, implikasi praksis selanjutnya diharapkan dapat merekonstruksi model pendidikan kewarganegaraan berbasis sosial-kultural (etnik-lokal) bagi kepentingan pembelajaran pada lingkup akademik di persekolahan dan model pendidikan politik dalam organisasi kemasyarakatan; yakni sebagai ikhtiar pengayaan dan pengembangan strategi pembelajaran / penanaman *spirit* dan kesadaran kewarganegaraan; di dalam kedudukan sebagai *Civic Education*, hingga lingkup luas dalam makna sebagai *Citizenship Education* pada tataran ekstra dan non-akademik. Dengan demikian, sejauhmana model pengembangan program tersebut dapat mengantarkan warganegara muda Indonesia menjadi manusia pribadi, anggota keluarga / masyarakat, dan warganegara yang dapat diandalkan dalam menjaga harkat bangsa dan kelangsungan negara di tengah persaingan dan ancaman dunia tanpa-batas melalui kegiatan pembelajaran kewarganegaraan berbasis sosial kultural lokal Nusantara – dapat direkomendasikan memenuhi kebutuhan menu pengembangan pasca studi ini.

### **3. Kebermaknaan dan Keterkaitan Penelitian**

#### **a. Kebermaknaan Penelitian**

Penelitian ini, diproyeksikan memiliki kebermaknaan yang cukup besar baik secara konseptual-teoritik maupun praksis. Secara konseptual teoritik, diharapkan dapat memberikan sumbangan, paling tidak pada rekonstruksi cara pandang (*verstehen*) terhadap permasalahan pencapaian tujuan pendidikan nasional, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan baik dalam konteks kurikulum sekolah maupun lingkup kemasyarakatan secara fenomenologis dan kajian kritis. Sudut praktisnya, bagian dari studi ini dapat berlanjut pada ujicoba model pembelajaran di persekolahan berbasis pendekatan kultural-lokal mulai dari Jawa barat hingga tempat lain dalam

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

konfigurasi integritas nasional Nusantara. Berdasar uji-coba model, dapat direkomendasikan konsep strategis pengembangan karakter warganegara yang diharapkan, seiring proses tumbuh-kembang peserta-didik di sekolah hingga memasuki fase menjadi warganegara dewasa di tengah masyarakat luas.

### **b. Kaitan dengan Studi Sebelumnya**

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah studi yang telah dilakukan sebelumnya baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional khususnya berkenaan dengan Nilai-nilai Kultural Tradisional yang menjadi karakterisasi perilaku manusia dan masyarakat Sunda dalam perspektif politik dan kepemimpinan di tanah air, setidaknya yang dilakukan Suwarsih Warnaen Dkk., dilanjutkan Yus Rusyana (*Pandangan Hidup Orang Sunda : Dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda, Proyek Sundanologi I-II, 1987*); Edi Ekajati, sebagai Pimpinan Proyek Pengkajian Kebudayaan Nusantara Jawa Barat (*Sundanologi*) 1986-1989 melalui lanjutan sejumlah penelitian sejarah bersumber Naskah lawas yang telah dirintis Atja dan Saleh Dana Sasmita, yang kesemuanya bermuara pada Sebuah Tinjauan Besar tentang Kebudayaan Sunda berbasis Historis-Filologis (*Kebudayaan Sunda : 1, Suatu Pendekatan Sejarah, 1993: 2. Jaman Pajajaran, 2003*); Dengan menggunakan Perspektif Antropologis penelitian terdahulu berkenaan dengan jejak-bangun kehidupan etnik masyarakat Sunda telah dilakukan oleh Garna (1990) pada Masyarakat Kanekes; Adimiharja pada Masyarakat Kampung Adat Ciptagelar (1991); dan Budimansyah pada Masyarakat Kampung Naga, (1994); kemudian Tjetjep Rosmana, Dkk. (*Ungkapan Tradisional yang Mengandung Kepemimpinan di Kabupaten Sumedang, Balai Kajian Sejarah & Nilai Tradisional, 2004*); Nandang Koswara (*Uga Bandung Dalam Memprediksi Fenomena dan Perubahan Alam Kehidupan Orang Sunda: Bandung, Unpad : 2010*); Ayip Rosidi (*Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda, Bandung, 2011*); Zaeni Alief, (*Permainan Tradisional Anak Sunda, Makna Filosofis dan Implementasinya dalam Pendidikan,*

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

*NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bandung FSR-ITB, 2013). Bahwa sebanyak penelitian bersifat antropologis dan etnografis khususnya telah banyak dilakukan – meski tidak langsung bertemakan masalah Pendidikan Kewarganegaraan, dan sebanyak itu pula kajian berkenaan permasalahan pendidikan kewarganegaraan khususnya, telah dilakukan mulai dari sudut substansi materil keilmuan yang menjadi isi dasarnya seperti politik, demokrasi, hukum dan pemerintahan. Salah satunya yang dilakukan Winataputra (2001), “Jatidiri PKn sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi”, dan terkait pencarian landasan filosofis keilmuannya telah dilakukan Sapriya (2007), dengan menggali “Perspektif Pemikiran Pakar tentang PKn dalam Pembangunan Karakter Bangsa”. Namun sebagaimana diungkapkan Numan Somantri, dalam berbagai kesempatan (2010) bahwa terkait dengan pengokohan landasan filosofik keilmuan bidang studi ini masih menyisakan ruang yang menantang bagi peneliti selanjutnya. Demikian pula, dari perspektif Sosial kultural yang merupakan salah satu aspek penting di dalam pengembangan praksis didaktik metodik PKn sebagai pendidikan nilai-moral kemasyarakatan, dirasakan terdapat bagian yang belum tersentuh pula oleh peneliti sebelumnya, sehingga menggelitik peneliti dan rekan antara lain : Siti Masyitoh dan Rakhmat memilih tema studi dari sudut pandang kebudayaan dan etnopedagogis sebagai pendekatan.

Sementara itu, merujuk laporan hasil studi internasional, berkenaan dengan tema kewarganegaraan global (*Citizenship*), sebagaimana kemudian menjadi kajian pokok studi kewarganegaraan (*Handbook of Citizenship Studies*) dihimpun oleh Engin F. Isin dan Bryan Turner sebagai Editor (2002), mengetengahkan sejumlah tema kajian kewarganegaraan dalam berbagai perspektif, antara lain mulai dari *Political Citizenship* tulisan Thomas Janoski dan Brian Grand, *Economic Citizenship* tulisan Anthony Woodiwiss, *Social Citizenship* tulisan Maurice Roche, *Ancient Citizenship and its Inheritors* karya David Burchell, *Modern Citizenship* dari Roger M Smith, *Citizenship after Orientalism* oleh Engin F. Isin, *Liberal Citizenship*

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tulisan Peter H. Schuck, *Republican Citizenship* karya Richard Dagger, *Communitarianism and Citizenship* oleh Gerard Delanty, *Cultural Citizenship* dari Toby Miller, *Multicultural* tulisan Cristian Joppke, *Religions and Politics : The Elementary Forms of Citizenship* oleh Bryan S. Turner, hingga, *Toward Post-National and Denationalized Citizenship* tulisan Saskia Sassen, *Ecological Citizenship* oleh Deane Curtin, dan *Cosmopolitan Citizenship* dari Andrew Linklater.

Bahwa persoalan kewarganegaraan sebagaimana berlangsung di berbagai negara, termasuk di tanah air menunjukkan perspektif yang luas dan kompleks, yang membuka peluang untuk dilakukan kajian secara komprehensif dari berbagai sudut pandang baik teoritis dan praktis melingkup berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang garis besarnya dapat diklasifikasi : *Pertama*, terkait dengan status dan hak sipil meliputi aktualisasi politik itu sendiri, perspektif ekonomi, dan problematika sosial mendasar sebagai warga negara; *Kedua*, dilihat berdasar bentuk dan asal-usulnya mulai sebagai warisan purba, memasuki perkembangan modern hingga post-modern; *Ketiga*, kaitan dengan fragmentarisme dan implementasi ideologi seperti liberalisme, republikanisme, komunitarianisme; *Keempat*, wujud keseluruhannya sebagai aktualisasi dan produk satuan budaya hingga keragaman bentuk yang mengikat dan menyatukannya, yakni *cultural* dan *multicultural citizenship*.

Kepentingan studi ini sendiri, mencoba melihat persoalan pencapaian tujuan pengembangan pendidikan kewarganegaraan, tidak saja secara konseptual- normatif, tetapi lebih dari itu terwujud menjadi realitas yang hidup dalam bentuk semangat (*spirit*) atau sekurang-kurangnya sebagai refleksi kesadaran (*awareness*) baik secara personal dan kolektif di dalam kesatuan masyarakat (*komunitas*). Karena itu, pendekatan kultural menjadi pilihan – bukan terutama dimaksudkan melantunkan *etnisisme-lokal* yang tidak perlu. Tetapi mencari *spirit* kultural sebagai dasar bagi pengembangan perilaku kolektif manusia di dalam masyarakat atas nama pendidikan, yang tidak bisa ‘tidak’ meminjam akar dari mana pola atau system kebudayaan itu

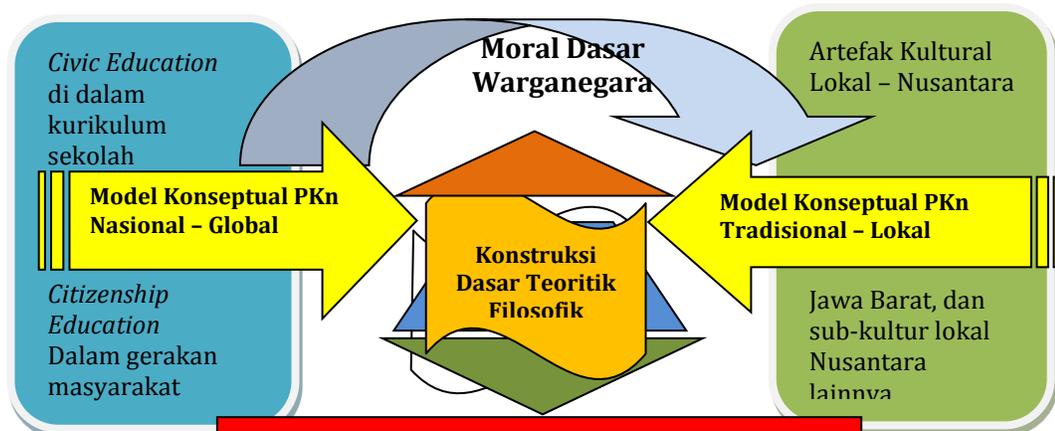
Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

**NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilahirkan. Bahwa semua bangsa di dunia ini, dengan tingkat peradaban dan segala kebudayaan yang dimilikinya dimulai dari pembentukan entitas dan identitas pada satuan etnik, dan meski setiap etnik memiliki cirinya sendiri tiadalah yang membungkus diri untuk hanya menjadi dirinya sendiri, melainkan terbuka menjadi bagian dalam kebersamaan dan kemajuan baik secara nasional, regional dan global.

Paradigma Penelitian :



Solihin Ichas Hamid A  
NILAI MORAL KEWARGA  
SUNDA : Studi Eksplorasi  
Ritual Adat Budaya Sunda

Universitas Pendidikan Indonesia | repositori

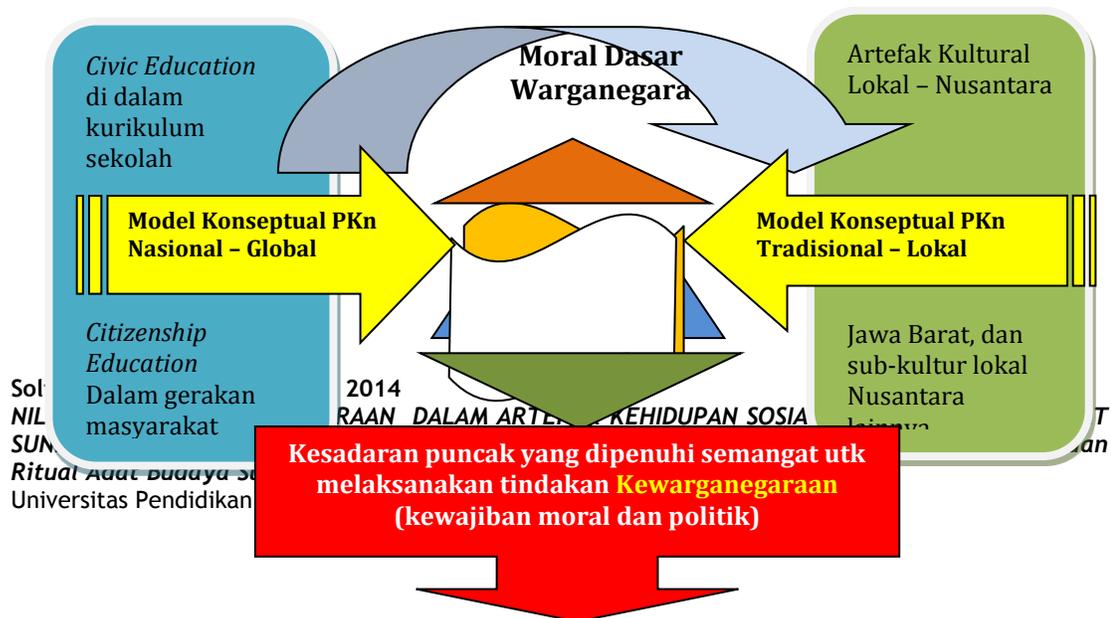
artikulasi Seni dan  
tindakan.upi.edu

MORAL MASYARAKAT  
Artikulasi Seni dan



**Gambar 1.1. :**  
**Landasan dan Tujuan Pengembangan Studi**  
**Pembelajaran PKn Berbasis Budaya Lokal**

Paradigma Penelitian :



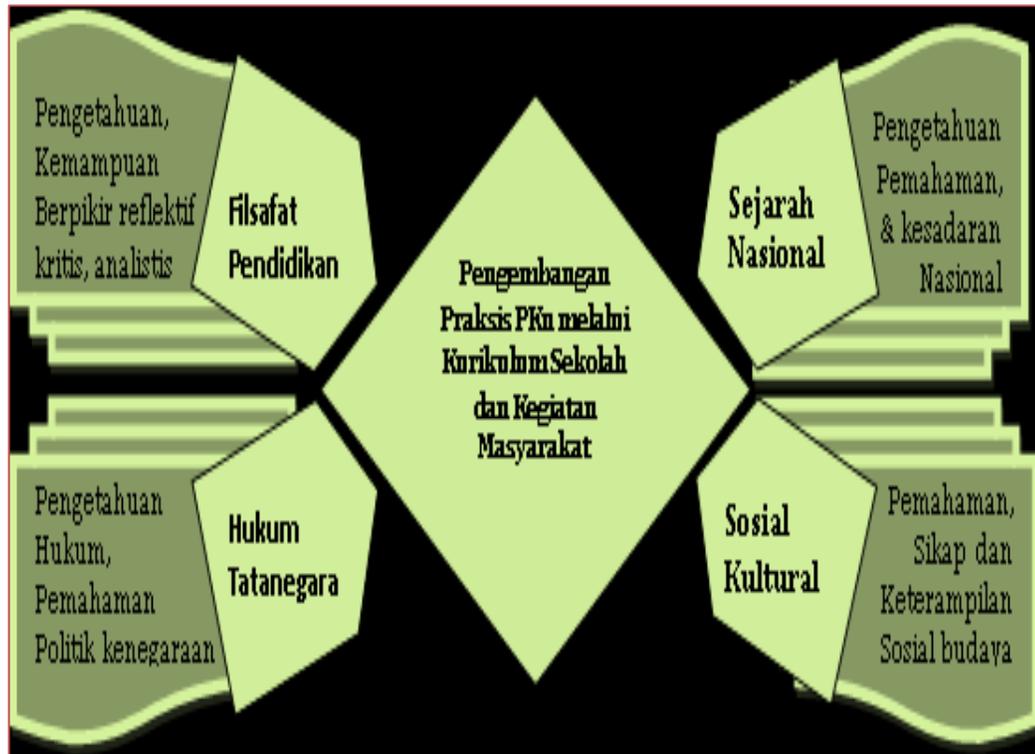


**Gambar 1.1. :**  
**Landasan dan Tujuan Pengembangan Studi**  
**Pembelajaran PKn Berbasis Budaya Lokal**

Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

*NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda*

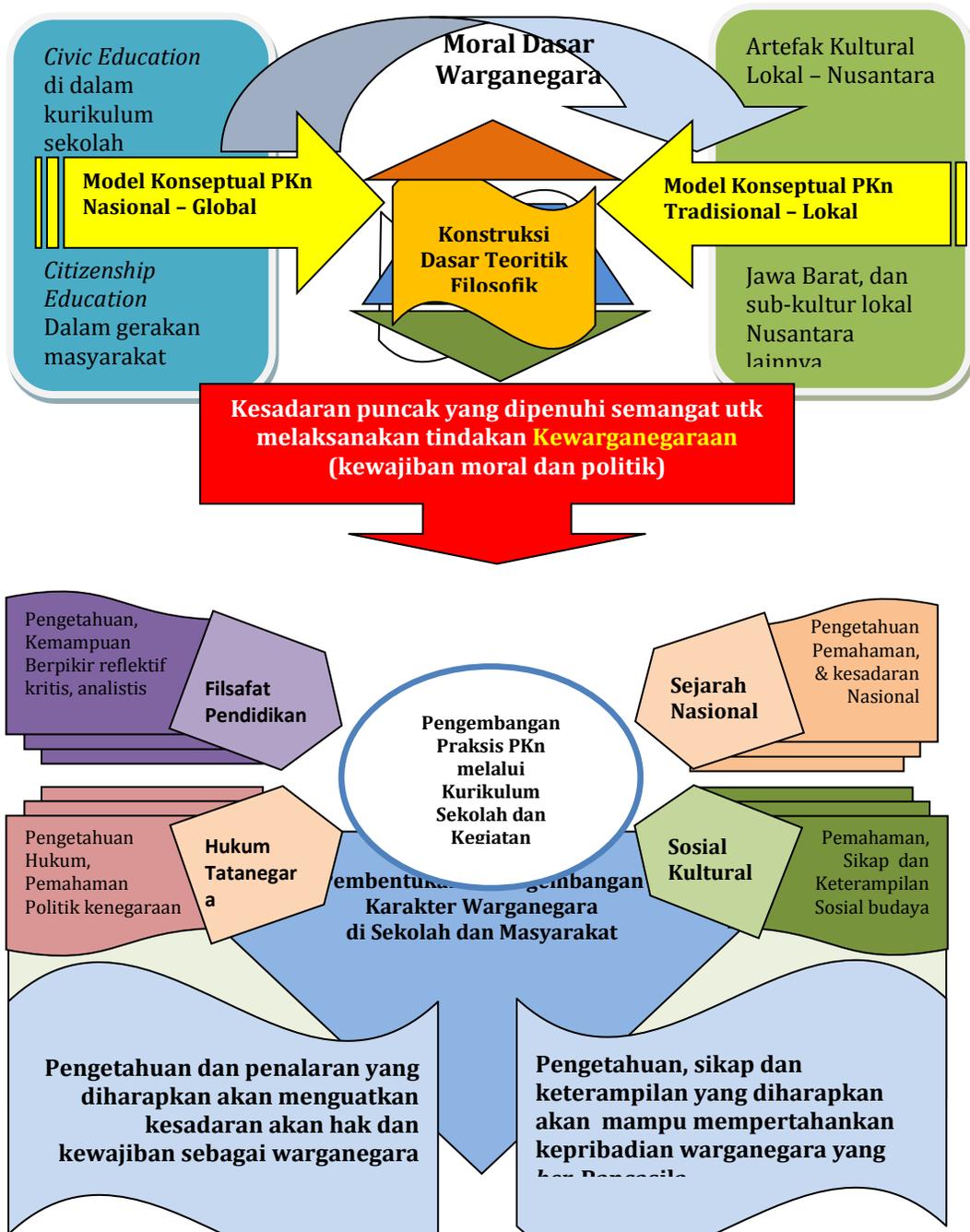
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)



Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, 2014

*NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)



Solihin Ichas Hamid Al-Lamri, *NILAI MORAL KEWARGANEGARAAN DALAM ARTEFAK KEHIDUPAN SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT SUNDA : Studi Eksploratif Nilai Moral Kewarganegaraan dalam Ungkapan, Artikulasi Seni dan Ritual Adat Budaya Sunda*